

PORTOFOLIO
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

(Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kelompok dengan Menganalisis 3 artikel, 3 jurnal Nasional, 2 jurnal Internasional, serta 1 laporan keuangan Akuntansi Sektor Publik)

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Pujiati, M.Pd.
Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.
Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 11

Adea Aprilia 2313031034
Fajriyatur Rohmah 2313031048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ANALISIS ARTIKEL 1

A. IDENTITAS ARTIKEL

Judul Artikel	Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)
Nama Penulis	Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari
Tahun Terbit Artikel	2014

B. DESKRIPSI ARTIKEL

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam lampiran II paragraf 17, dinyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing kelompok pengguna.

Sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hullah dkk. 2012). Kapasitas ini harus dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, menghasilkan keluaran (output), dan mencapai hasil (outcomes).

Pengendalian intern mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjagakekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keterandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi 2005).

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik. Selain itu, pemanfaatan kemajuan TI bertujuan agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah (Hamzah 2009).

Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah secara otomatis memerlukan pemahaman akuntansi yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tersebut. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta 2006), pemahaman berarti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses atau cara memahami. Dengan demikian, individu yang memiliki pemahaman akuntansi adalah mereka yang benar-benar memahami prinsip dan prosedur akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Yuliani 2010).

C. KESIMPULAN

Pemahaman akuntansi ini berkaitan dengan proses dan prosedur akuntansi yang dilakukan berdasarkan SAP (Yuliani 2010). Dengan memperhatikan latar belakang dan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Setiawati, Erma, and Shinta Permata Sari. "Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Eks Karesidenan Surakarta)." (2014).

ANALISIS ARTIKEL 2

A. IDENTITAS ARTIKEL

Judul Artikel	Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia
Nama Penulis	Junaidi
Tahun Terbit Artikel	2015

B. DESKRIPSI ARTIKEL

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa. Tulisan membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa. Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku kepala desa.

Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi singkat bagi akuntan desa untuk menyusun laporan keuangan desa. Kepala Desa diharapkan untuk menginvestasikan sejumlah besar dana dari belanja modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat

C. KESIMPULAN

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan. Selain dana transfer APBN terdapat juga dana alokasi desa yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah sebesar 10% yang diberikan pada tiap-tiap desa. Pemberlakuan UndangUndang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan.

Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa. Perdebatan tentang desa sebagai entitas pelaporan atau entitas akuntansi masih dominan terjadi. Karya tulis ini tetap mengacu pada entitas desa sebagai entitas pelaporan. Kegagalan entitas pelaporan Pemdes dalam menyusun laporan keuangan yang wajar, mengakibatkan saat laporan keuangan penggabungan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) disusun juga menjadi tidak wajar, saat laporan keuangan konsolidasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat (Pempus) juga menjadi tidak wajar.

Pada tahun 2007 hanya satu Pemda yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari 185 Pemda yang terpublikasi di data Kementerian Keuangan, yang menginvestasikan dana menganggurnya pada deposito. Pada tahun 2008 ada tambahan satu Pemda lagi yaitu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dari 439 pemda yang terpublikasi di data kementerian keuangan, yang menginvestasikan dana menganggurnya pada deposito.

Namun jumlah ini meningkat karena peningkatan jumlah Pemda yang membentuk dana cadangan, bukan karena Pemda tersebut kreatif meningkatkan dana cadangannya dengan cara menginvestasikan dana cadangan tersebut agar memperoleh return yang pada dasarnya wujud pengejawantahan akuntansi. Perencanaan yang baik akan memberi gambaran yang jelas dan tegas akan kemana desa dimasa yang akan datang. Tabel 1 menggambarkan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB Desa) di Kabupaten 'X' yang diasumsikan terdiri dari tiga desa yang terdapat pada suatu Pemda 'ABC' pada tahun 2015.

D. DAFTAR PUSTAKA

Mubaroka, Dia, Noor Shodiq Askandar, and Junaidi Junaidi. "Perlakuan akuntansi sektor publik desa (studi kasus di desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 6.09 (2017).

ANALISIS ARTIKEL 3

A. IDENTITAS ARTIKEL

Judul Artikel	Persepsi Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Pemerintah
Nama Penulis	Kariyoto
Tahun Terbit Artikel	2017

B. DESKRIPSI ARTIKEL

Tulisan ini bertujuan untuk Persepsi yang disebarluaskan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan Indonesia adalah akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik. Logika pengajaran disebarluaskan selalu dimulai dari bahasan pemerintahan yang bersih dan individu yang bersih. Definisi uang dalam pemerintahan yang bersih di Indonesia melibatkan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dana konsolidasi serta dana pinjaman nasional dalam menyusun rencana anggaran (RAPBN/RAPBD) yang sesuai.

Masalah yang ada, pada umumnya, sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri nasional perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, perusahaan publik. Namun kata tersebut dirasa kurang tepat, sehingga frase pemerintah yang berkuasa masih menjadi perdebatan kontroversial dalam konteks demokrasi yang menyatakan bahwa rakyatlah yang paling berkuasa. Tujuan penulisan artikel ini menjelaskan pemahaman atau persepsi yang benar tentang akuntansi sektor publik. Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. Kata kunci: persepsi, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan.

C. KESIMPULAN

Masalah yang ada, pada umumnya, sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri nasional perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, perusahaan publik. Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. Sebelumnya pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit dan lebih dikenal sebagai

akuntansi pemerintahan. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia lebih berkiblat ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Akibat dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan.

Jadi akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perkenomian negara selama lebih lima puluh tahun ini. Jadi pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak kosongnya pengaturan praktik-praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Akuntansi agar mendukung pemerintah atau dengan kata lain, dalam mempertanggungjawabkan terhadap keputusan sumber daya apa yang seharusnya dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan militer (dan kebutuhan ekspor) serta kebutuhan kelompok sipil, diperlukan sumber daya dan pengetahuan yang rasional.

Jadi praktik akuntansi pemerintahan yang benar mendapatkan dukungan yang luas dalam Orde Reformasi. Pengembangan Akuntansi Sektor Publik Pengembangan akuntansi sektor publik, tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. Seorang ekonom, Suranyi-Unger, yang menghabiskan hidupnya di Hongaria, tetapi menulis di Amerika Serikat, menyajikan perbandingan sistem ekonomi dan mensintesisnya menjadi tiga kelompok, yaitu negara seperti Amerika Serikat yang menerapkan ekonomi liberal (kebebasan ekonomi), negara seperti Rusia yang mengadopsi ekonomi terpusat, serta negara seperti Inggris dan Perancis yang menerapkan kebebasan ekonomi barat secara tradisional, tetapi dalam dua dekade terdahulu telah beralih melaksanakan kompromi antara kebebasan dan perencanaan ekonomi sektor publik dengan persetujuan negara-negara tertentu yang menggunakan perencanaan ketimuran. Perbedaan tersebut melukiskan betapa sektor publik berkembang sesuai dengan tekanan yang ada terhadap latar belakang sejarah yang dimiliki dan sumber dayanya, jadi memahami kinerja sektor publik sebaiknya dimulai bukan dari sisi teknis namun pada konsep dasar organisasi tersebut.

Slogan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), yang selalu digunakan dalam argumentasi debat di kelas, yaitu abdi rakyat atau pelayan masyarakat (sekarang merupakan organisasi pegawai negeri sipil yang berdiri sendiri) mencoba menggambarkan organisasi yang pada saat ini telah memperoleh pengakuan di Indonesia, serta bagaimana perbedaannya dengan pemerintah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Kariyoto, Kariyoto. "Persepsi Akuntansi Sektor Publik versus Akuntansi Pemerintahan." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11.2 (2017): 18-27.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

VALUE FOR MONEY AUDIT ATAS ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

Pengagaran pada organisasi sektor publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah (Pusat/ Kabupaten/ Kota) guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihakpihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah Tindakan, Abdul Halim (2002: 143). Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya “pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan” Mardiasmo (2002 : 12). Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo, (2002 : 4).

Sektor publik adalah government (pemerintah) yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi „kekuasaan“ oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik yang berdasarkan aturan yang berlaku. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penganggaran yang terdiri atas struktur dan proses penyusunan anggaran yang mengaitkan kinerja dengan alokasi anggaran berdasarkan klasifikasi aktivitas dan ukuran kinerja. Information base merupakan suatu mekanisme menjelaskan secara detail mengenai pengeluaran pemerintah dalam anggaran, Penelitian ini dimensi kinerja yang akan dipakai adalah dimensi kuantitas kerja, kualitas kerja, kerja sama, pemahaman terhadap tugas, inisiatif, disiplin, tanggung jawab dan kehandalan.

Kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam anggarannya guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Anggaran dan laporan keuangan merupakan sumber informasi dalam menilai kinerja keuangan suatu organisasi. Audit kinerja (value for money) Adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep value for money yang merupakan perluasan ruang lingkup dari audit finansial. Indikator pengukuran kinerjanya terdiri dari ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Penetapan anggaran pada Diklat Kesempatanaan dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angkatan I dan II telah ekonomis untuk mata belanja honor yang terkait dengan output kegiatan yang meliputi : 1) honor Pelaksana kegiatan terdiri dari honor pengarah, honor penanggung jawab, honor ketua, honor wakil ketua, honor Sekretaris, Honor anggota, 2) uang saku peserta. Jenis belanja ini telah hemat, cermat dalam pengadaan anggaran Diklat. Untuk penetapan anggaran yang tidak ekonomis untuk jenis belanja belanja barang non operasional lainnya menunjukkan jenis belanja perawatan kesahatan menunjukkan harga satuan lebih besar dari harga standar, karena Diklat Teknis berorientasi pada wawasan, Diklat fisik dan mental Pegawa. Serta untuk harga satuan yang tidak menggunakan harga standar tidak bisa dilihat keekonomisannya.

Pelaksanaan anggaran Diklat Kesamptaan telah efisien dibandingkan anggaran untuk belanja barang non operasional lainnya untuk jenis biaya perlengkapan dan tanda pengenal anggaran dan biaya penyelenggaraan, anggaran menunjukkan realisasi anggaran yang digunakan lebih rendah dari anggaran yang tersedia, ini dianggap belum efisien. Untuk Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angkatan I dilihat belanja barang non operasional lainnya untuk jenis biaya konsumsi dan akomodasi peserta telah efisien untuk angkatan I dan II. Untuk belanja perjalanan lainnya untuk Diklat Pengadaan Barang/Jasa angkatan I jenis belanja penginapan pengawas telah efisien untuk angkatan I dan II, transport pengawas dan tutor anggaran I telah efisien, transport widyaiswara untuk angkatan I dan II telah efisien. Ini dilakukan dengan sumber anggaran ada dan telah diimplementasikan melalui kegiatan Diklat dapat meminimalisir, dengan menghindari pengeluaran yang boros. Adapun jenis belanja dianggap tidak efisien pada Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari jenis belanja Perjalanan dari dalam dan luar kota untuk angkatan I dan taransport pelaksana kegiatan angkatan I dan II hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan dalam jenis belanja perjalanan.

Efektivitas pelaksanaan Diklat Kesamptaan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, penyelenggaraan ini telah sesuai dengan tujuan dari diselenggarakannya Diklat Kesamptaan. Demikian juga dengan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angkatan I dan II telah efektif ditandai dengan hasil pelaksanaan Diklat yang telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun dilihat dari jumlah peserta yang lulus hanya sedikit.

Sumber : <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=5135>

ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

KINERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU BERDASARKAN VALUE FOR MONEY AUDIT TAHUN 2014-2018

Good governance adalah suatu penyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif serta menjalankan disiplin anggaran bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Value for money merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencapai good governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2011: 4) Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis menurut Azheri (2012: 112).

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Menurut Azheri (2012: 114) teori stakeholder mengatakan bahwa instansi/perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

(Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Menurut Mardiasmo (2011: 121) kualitas kinerja keuangan merupakan gambaran/ kondisi kinerja sektor publik berdasarkan perhitungan rasio yang dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (a) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (b) untuk pengalokasian sumber ddaya dan pembuatan keputusan dan (c) untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 1. Kinerja pemerintah Provinsi Riau dilihat dari aspek keuangan yaitu : a) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal/ Otonomi Fiskal Daerah (DDF) Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018 berkategori baik karena meskipun nilai Total PAD Provinsi Riau lebih rendah jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah namun persentase ratanya mendekati 50%.

- b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018 berkategori tinggi. Total PAD Provinsi Riau cukup tinggi jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Transfer. c) Rasio Efektivitas PAD Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018 berkategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target PAD belum efektif karena belum mencapai 100%.
d) Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 yang berkategori kurang baik. e) Rasio Keserasian Belanja Operasi Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018 berkategori seimbang.

Artinya sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Riau digunakan untuk belanja operasi. f) Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi Riau selama Tahun 2013- 2018 berkategori tidak seimbang. Artinya keserasian belanja modal Pemerintah Provinsi Riau tidak optimal. Hal ini karena jumlah pendapatan daerah Provinsi Riau yang digunakan untuk belanja modal tidak sesuai dengan proporsi biaya modal yang telah ditetapkan. 2. Kemampuan sumber daya manusia di Pemerintahan Provinsi Riau dalam kondisi yang baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 3,44 yang berkategori baik. 3. Pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintahan Provinsi Riau sudah berjalan baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 4,04 yang berkategori baik.

Sumber : [Arief, Firda Rahmadhany, Yessi Muthia Basri dan Novita Indrawati, 2017, Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit, Jurnal Ekonomi Volume 25, Nomor 2 Juni 2017](#)

ANALISIS JURNAL NASIONAL 3

VALUE FOR MONEY AUDIT UNTUK MENILAI KINERJA LEMBAGA SEKTOR PUBLIK

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, Tujuan Konsep Value for Money untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh manfaat maksimum dari barang dan jasa yang di butuhkan dan digunakan dari sumber daya yang tersedia. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif agar dapat melakukan penilaian secara independent atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Tujuan Value for Money audit adalah untuk meningkatkan akutabilitas lembaga sector publik dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independent dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan , tanpa pemberian recomendasi perbaikan. Sedangkan dalam Value for Money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahap audit yang telah dilaksanakan. Audit ekonomi dan efisien bertujuan untuk menentukan: 1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. 2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak efisien, termasuk ketidak mampuan organisasi dalam mengelola system informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: 1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan 2. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya 3. Apakah entitas yang di audit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Value for Money audit penting untuk mendukung pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi fiscal karena dalam era otonomi daerah DPR/DPRD dan lembaga- lembaga pemerintah pusat/ daerah, harus memberikan pertanggung jawaban publik kepada masyarakat. Akuntabilitas publik merupakan bagian penting dari sistem politik dan demokrasi. Akuntabilitas sektor publik berarti lembaga-lembaga publik seperti pemerintah

pusat dan daerah, harus memberikan penjelasan kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas atas aktifitas yang dilakukan sebagai konsekuensi dari amanat yang diembannya.

Ekonomis berkaitan dengan biaya yang rendah, efisiensi mengacu pada perbandingan (rasio) terbaik antara output dengan biaya (input) sudut ekonomis dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: a. apakah suatu lembaga telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien. b. penyebab terjadinya praktik-praktik tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi. 3. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: a. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. b. kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. c. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Sumber : [M Djazari, 2009, Value For Money Audit Untuk Menilai Kinerja Lembaga Sektor Publik, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Volume 8, Nomor 1 2009, Hal 18-22.](#)

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

MEMAJUKAN INOVASI DI SEKTOR PUBLIK: MENYELARASKAN PENGUKURAN INOVASI DENGAN TUJUAN KEBIJAKAN

Sejarah pengukuran inovasi di sektor publik Hingga akhir tahun 2000-an, penelitian tentang inovasi di sektor publik terutama dilakukan oleh para peneliti yang tertarik dengan administrasi atau manajemen publik, dengan menggunakan studi kasus, wawancara, dan data tentang inovasi spesifik di dalam lembaga sektor publik. Sebagian besar literatur ini berfokus pada efek tata kelola, faktor organisasi, dan karakteristik pribadi manajer terhadap inovasi (Bernier et al., 2015). Selain studi kasus dan wawancara, peneliti manajemen mengevaluasi penghargaan atau data lain untuk inovasi individu atau bertanya kepada manajer sektor publik apakah organisasi mereka telah mengadopsi daftar praktik atau teknologi inovasi yang telah ditentukan sebelumnya. Studi yang relevan tentang inovasi individu menggunakan data penghargaan inovasi untuk Amerika Serikat dan untuk Kanada dan negara-negara.

Survei representatif skala besar pertama yang didedikasikan untuk inovasi sektor publik adalah survei MEPIN 2008-2009 terhadap organisasi sektor publik di Skandinavia, yang memperoleh lebih dari 2000 tanggapan dari manajer sektor publik. Sedapat mungkin, survei MEPIN mengikuti pedoman dari Manual Oslo edisi ketiga (OECD/ Eurostat, 2005), tetapi beberapa perubahan diperlukan untuk definisi manual dari empat jenis inovasi (produk, proses, organisasi dan pemasaran) untuk memperhitungkan karakteristik inovasi di sektor publik (Bugge et al., 2011). Misalnya, kategori inovasi pemasaran manual diubah menjadi inovasi 'komunikasi'.

Survei MEPIN diikuti oleh survei inovasi sektor publik lainnya. Telah terjadi proses pembelajaran yang terus-menerus dimana setiap survei mempengaruhi survei-survei berikutnya. Misalnya, survei MEPIN memengaruhi desain survei Innobarometer Eropa 2010, yang pada gilirannya memengaruhi desain survei APSII Australia 2012. Tabel 1 juga mencakup survei tahun 2015 tentang inovasi produk, layanan, organisasi, dan komunikasi di sektor Kesehatan. Menerapkan pedoman manual Oslo ke sektor publik Pedoman Manual Oslo adalah tanggung jawab OECD Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators (NESTI).

Tujuan dari Manual Oslo adalah untuk mendukung pengumpulan data inovasi di sektor bisnis yang representatif secara statistik dan dapat diperbandingkan secara internasional. Edisi keempat Manual Oslo (OECD/Eurostat, 2018) memberikan definisi inovasi universal yang berlaku untuk semua sektor yang tercakup dalam Sistem Akun Nasional dan mencakup diskusi singkat tentang nilai pengumpulan data inovasi sektor publik.

Meskipun perbedaan antara proses inovasi di sektor publik dan sektor bisnis diakui secara luas, ada beberapa keuntungan untuk mengikuti pengukuran inovasi sektor publik, jika memungkinkan, panduan Manual Oslo. National Statistical Offices (NSOs) memiliki pengalaman luas dalam mengukur inovasi dan keahlian untuk melakukan survei inovasi berskala besar di sektor publik. NSO di lebih dari 60 negara melakukan survei inovasi di sektor bisnis yang mematuhi Manual Oslo. Minat dan dukungan mereka dalam mengukur public.

Sumber : [Arundel, Antonius. 2019. Memajukan Inovasi di Sektor Publik : Menyelaraskan Pengukuran Inovasi dengan Tujuan Kebijakan.](#)

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL (IPSASS): TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS DAN AGENDA PENELITIAN MASA DEPAN

Praktik akuntansi di sektor swasta dan publik saat ini ditujukan untuk harmonisasi internasional dan meminimalkan perbedaan pelaporan keuangan antar negara. Munculnya harmonisasi akuntansi di tingkat internasional ini sangat didorong oleh kebutuhan akan transparansi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik (Eulner & Waldbauer,2018), pemerataan antargenerasi, dan lebih banyak efisiensi dan efektivitas terkait pengeluaran publik (Heald & Hodges,2015). Oleh karena itu, harmonisasi standar akuntansi dikaitkan dengan keterbandingan lanjutan informasi keuangan lintas pemerintah (Aggestam-Pontoppidan & Brusca, ; Brusca & Martínez,2016; Christiaens et al.,2015). Harmonisasi akuntansi sektor publik di tingkat internasional saat ini diwujudkan dengan menerapkan IPSASs (AggestamPontoppidan&Andernack,2016; Bergmann,2009).

Lebih rinci, IPSASs adalah seperangkat standar berbasis akrual yang memberikan dasar yang seragam untuk penyusunan laporan keuangan tahunan di sektor publik. Standar tersebut dikembangkan, disempurnakan, dan diterbitkan oleh IPSAS Board, sebuah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari, misalnya, perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah, pengadilan audit, praktisi publik, dan akademisi. Selain itu, publik luas disapa dalam konsultasi publik untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses pengembangan standar dengan mengomentari draf pemaparan yang dipublikasikan selama proses yang seharusnya.

Karena IPSAS dikeluarkan oleh Dewan IPSAS sebagai organ independen Federasi Akuntan Internasional (IFAC), baik pemerintah maupun organisasi internasional tidak diwajibkan untuk menerapkan IPSAS Secara umum, IPSAS diterapkan secara penuh atau sebagian oleh sekitar 80 negara, serta organisasi internasional seperti Komisi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, OECD, dan Perserikatan BangsaBangsa (OECD/IFAC,2017). Selain perbedaan besar antar negara dalam hal praktik akuntansi, tingkat pemerintahan di dalam negara bervariasi dalam hal standar akuntansi.

Misalnya, Austria menerapkan sebagian IPSAS di tingkat pemerintah pusat. Namun, pemerintah kota Austria saat ini masih menggunakan standar akuntansi berbasis uang tunai. Singkatnya, implementasi IPSAS sangat bervariasi antar negara dan tingkat pemerintahan, dan ada juga perbedaan dalam jumlah IPSAS

Banyak yang telah menggunakan teori yang berbeda untuk menjelaskan antecedent dan hasil adopsi IPSAS dan pengembangan sistem akuntansi menuju akuntansi akrual seperti IPSAS. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi IPSAS terutama telah dijelaskan oleh teori kelembagaan atau model kontingensi (misalnya, oleh Lüder, 1992, 1994, 2002). Ketika mempelajari implementasi akuntansi akrual berdasarkan IPSASs, banyak penulis telah menggunakan paradigma Manajemen Publik Baru (NPM) untuk menyatakan bahwa reformasi memodernisasi negara dan meningkatkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Lüder, 2002).

Selanjutnya, teori pilihan publik (Buchanan, 1972, 1978; Niskanen, 1971, 1973) dan teori institusional digunakan oleh Pina et al. (2009), sedangkan Bunget, Blidisel, Feleaga, dan Popa (2014) mengacu pada teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Teori konsolidasi juga telah digunakan (Bergmann, Grossi, Rauskala, & Fuchs, 2016; Bisogno, Santis, & Tommasetti, 2015). Untuk menjelaskan hasil adopsi IPSAS, studi mengandalkan NPM (misalnya, Bolivar & Galera, 2016), model tong sampah (lihat Robb & Newberry, 2007; Oulasvirta & Bailey, 2016), teori ekonomi (lihat Bergmann, 2012), atau pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian (lihat Fuchs, Bergmann, & Brusca, 2017). Akhirnya, sejumlah besar artikel menggambarkan praktik akuntansi tanpa secara eksplisit mengacu pada teori.

Lampiran Online 2–4 memberikan pemetaan teori yang lebih rinci yang dirujuk dalam rangkaian studi IPSAS kami yang dianalisis. Dalam berfokus pada reformasi akuntansi Portugis, Gomes, Fernandes, dan Carvalho (2015) mencirikan akuntansi sebagai praktik sosial dan kelembagaan karena kohesi di antara pemangku kepentingan tampaknya menjadi pendorong kesuksesan. Demikian pula, Brusca, Gómez Villegas, dan Montesinos (2016) menjelaskan penerapan IPSASs di Kolombia dan Peru dengan mengacu pada teori institusional dan menemukan bahwa kedua negara bertujuan modernisasi sistem akuntansi. Menurut Brusca, Montesinos, dan Chow (2013), keputusan pemerintah Spanyol untuk mengadopsi IPSAS dipengaruhi oleh tujuan politik dalam hal akuntabilitas sektor publik dan upaya promosi oleh Dewan IPSAS.

Jones dan Caruana (2016) menjelaskan keputusan pemerintah pusat Malta untuk sepenuhnya mengadopsi IPSAS sebagai hasil mengejar kredibilitas. Chan (2016) menemukan bahwa keputusan pemerintah Cina untuk mengadopsi akuntansi akrual dapat dikaitkan dengan keinginan untuk menangkal utang pemerintah daerah dan mengurangi risiko fiskal. Nistor dan Deaconu (2016) terkait adopsi Rumania akuntansi akrual dengan reformasi publik manajerial internasional dan faktor internal.

Sumber : [Schmidhuber, Lisa. 2020. Standart Akuntansi Sektor Publik Internasional \(IPSASs\): Tinjauan Literatur Sistematis dan Agenda penelitian masa depan.](#)

ANALISIS LAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

“LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021”

LKJ Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021, memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perwakilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP 06.00.00286/K/2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Penyusunan LKJ dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik keberhasilan maupun hambatannya selama Tahun 2021, dan peningkatan kinerja di Tahun 2022.

LKJ sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan skor 133, 49 dengan capaian kinerja yang Sangat Baik. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan ini adalah dapat memberikan manfaat kepada stakeholder dan sebagai umpan balik bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Sumber : [Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.](#)